

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam Peraturan Daerah ini urusan Keluarga Berencana diintegrasikan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dalam satu lembaga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terletak di Jl. S. Siswomiharjo No. 9 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Titik Koordinat -6.11853, 120.46408. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dinas yang melaksanakan kewenangan di bidangnya, diharapkan nantinya dapat mendampingi masyarakat terutama kelompok-kelompok perempuan untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pelayanan dengan program-program khusus yang dimilikinya.

Pengelolaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat diharapkan mampu menunjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjadi Daerah Kabupaten Kepulauan yang maju dan sejahtera dengan penduduk yang memiliki

kualitas yang dapat diandalkan untuk pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang terstruktur dan terintegrasi dengan kegiatan pembangunan melalui perencanaan yang strategis untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi setiap saat agar tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diemban oleh Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.1. STUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub. Bagian Program
 2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 3. Sub. Bagian Keuangan.
- III. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas:
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.
- IV. Bidang Perlindungan Anak
 1. Seksi Pemenuhan Hak Anak
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak
 3. Seksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

- V. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Berencana.
- VI. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1. Seksi Jaminan Ber-KB;
 - 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
 - 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- VII. Jabatan Fungsional;

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



2. TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), meliputi:

- a. Menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam

- lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
 - i. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - k. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, jumlah Pejabat

1. Jumlah Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana didukung oleh 35 orang Pegawai Negeri Sipil dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 5 golongan, meliputi : SLTA, D-3, S-1 dan S-2 dan S-3.

2. Kualifikasi Menurut Pendidikan

Tabel.Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S3	1
2.	S2	2
3.	S1	22
4.	D III	2
5.	SMA	8
JUMLAH		35

3. Klasifikasi menurut Pangkat dan Golongan

Tabel. Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	3
3.	Penata Tingkat I (III/d)	12
4.	Penata (III/c)	4
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2
6.	Penata Muda (III/a)	4
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	4
8.	Pengatur (II/c)	3
9.	Pengatur (II/b)	0
10.	Pengatur Muda(II/a)	0
JUMLAH		35

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Golongan	Jenis Kelamin	
		Laki – laki	Perempuan
1	IV	1	5
2	III	5	18
3	II	3	3
Jumlah		9	26

Data personil berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Strata 1 sebanyak 22 orang (62,86%), Pasca Sarjana sebanyak 3 orang (8,57%), Diploma III sebanyak 2 orang (5,71%) Sekolah Menengah Atas sebanyak 11 orang (22,86%). Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai sumber daya manusia yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pendidikan.

Penyuluh KB sebagai Pegawai Pusat Sebanyak 17 orang, S1 4 orang, D3 1 orang, SMA 12 orang. Penyuluh PTT sebanyak 30 orang, S1 5 orang, D3 1 orang dan SMA 24 orang. Staf PTT sebanyak 24 orang, S1 13 orang, D3 2 orang dan SMA 9 orang.

DP3AP2KB mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional

program DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar di wilayah kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD terdiri dari :

1. UPTD wilayah I : Kecamatan Bontomatene dan Buki
2. UPTD wilayah II : Kecamatan Bontomanai dan Benteng
3. UPTD wilayah III : Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu
4. UPTD wilayah IV : Kecamatan Takabonerate
5. UPTD wilayah V : Kecamatan Pasimarannu
6. UPTD wilayah VI : Kecamatan Pasilambena
7. UPTD wilayah VII : Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

A. Pendapatan

Dalam tahun anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak mengelola Pendapatan.

B. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp.8.588.889.881,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.448.702.029,- atau 86,72% dengan rincian belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 3.275.675.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.215.273.431,- atau 98,16%.
- b. Belanja Barang Jasa dianggarkan sebesar Rp. 4.137.405.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.080.416.082,- atau 74,45%.
- c. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 127.330.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 127.330.000,- atau 100%.

C. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp.1.048.479.681,- dan terealisasi sebesar Rp.1.025.682.516,- atau 97,83% dengan rincian belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp.164.671.885,- dan terealisasi sebesar Rp. 164.266.000,- atau 99,75%.
- b. Belanja Bangunan dan Gedung dianggarkan sebesar Rp. 883.807.796,- dan terealisasi sebesar Rp. 861.416.516,- atau 97,47%.

Dari kelompok Belanja Operasi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran Rp.4.163.990.700,- dan terealisasi sebesar Rp.4.087.539.395,- atau 98,16% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Akurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.530.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.310.800,- atau 93,75% dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output sub kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.873.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.233.900,- atau 94,11% dari alokasi anggaran;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya RKA Pokok dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.286.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.966.000,- atau 92,54%;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya RKA Perubahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.905.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.905.100,- atau 100%;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya DPA Pokok dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.150.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 910.700,- atau 79,14%;

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya DPA Perubahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.315.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.295.100,- atau 98,48%.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan Persentase ketersediaan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dengan alokasi anggaran Rp. 3.287.205.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.226.513.431,- atau 98,15% dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output sub kegiatan Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan dengan alokasi anggaran Rp. 3.275.675.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.215.273.431,- atau 98,16% dari alokasi anggaran;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output sub kegiatan Jumlah Penyuluh KB yang dinilai angka kreditnya, tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output sub kegiatan Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun dan dilaporkan dengan alokasi anggaran Rp. 7.380.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.100.000,- atau 96,21% dari alokasi anggaran;
 - 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan output sub kegiatan jumlah dokumen tanggapan LHP yang disusun dan dilaporkan dengan alokasi anggaran 4.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.140.000,- atau 99,76%.
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran.
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan administrasi umum dengan alokasi anggaran Rp. 287.2467.500,-, dan terealisasi sebesar Rp. 284.501.245,- atau 98,97% dari alokasi anggaran. Adapun sub

rincian kegiatan dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output sub kegiatan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran Rp. 1.458.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.458.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output sub kegiatan Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia dengan alokasi anggaran Rp. 6.259.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.759.500,- atau 76,04% dari alokasi anggaran;
 - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output sub kegiatan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia, dengan alokasi anggaran Rp. 2.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.400.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;
 - 4) Fasilitas Kunjungan Tamu tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran;
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output sub kegiatan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara, dengan alokasi anggaran Rp. 277.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 275.883.745,- atau 99,47% dari alokasi anggaran.
- e) Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan alokasi anggaran Rp. 91.666.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.666.000,- atau 100% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Mebel dengan output sub kegiatan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%;
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output sub kegiatan Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia dengan alokasi anggaran Rp. 76.666.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 76.666.000,- atau 100%.
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran Rp. 365.881.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 354.579.218,- atau 96,91% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output sub kegiatan Jumlah ATK yang tersedia, dengan alokasi anggaran Rp. 72.404.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.260.950,- atau 98,42%;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output sub kegiatan Jumlah layanan telepon, listrik dan air yang tersedia, dengan alokasi anggaran Rp. 67.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.730.268,- atau 85,53%;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output sub kegiatan Jumlah layanan umum kantor yang tersedia, dengan alokasi anggaran Rp. 225.976.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 225.588.000,- atau 99,83%.
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran, dengan alokasi anggaran Rp. 112.240.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 111.968.701,- atau 99,76%. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output sub kegiatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara, dengan alokasi anggaran Rp. 99.180.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.973.701,- atau 99,79%;
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output sub kegiatan Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara, dengan alokasi anggaran Rp. 8.120.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.055.000,- atau 99,20%;
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output sub kegiatan Jumlah gedung kantor yang dipelihara, dengan alokasi anggaran Rp. 4.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.940.000,- atau 100%.

6) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dengan Alokasi Anggaran Rp.27.200.000,- dan Terealisasi Rp.22.899.200,- atau 84,19% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kewenangan kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 27.200.000,- dan Terealisasi Rp. 22.899.200,- atau 84,19% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten Kota output sub kegiatan Jumlah Focal Point Tingkat Kabupaten Yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam pelaksanaan Tugas dan Jumlah OPD dengan alokasi anggaran Rp. 27.200.000,- dan Terealisasi Rp. 22.899.200,- atau 84,19% dari alokasi anggaran.
- b) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif daerah, tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) Advokasi kebijakan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi, tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran.

7) Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan bertujuan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dengan alokasi anggaran Rp. 38.949.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.620.500,- atau 91,45% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Perlindungan Perempuan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Output Kegiatan Persentase Layanan Pendampingan Perlindungan Perempuan dengan alokasi anggaran Rp. 38.949.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.620.500,- atau 91,45% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penguatan dan

Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Output sub Kegiatan Kuatnya hubungan antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dengan alokasi anggaran Rp. 38.949.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.620.500,- atau 91,45% dari alokasi anggaran.

8) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan alokasi anggaran Rp.

53.229.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.247.000,- atau 90,63% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Peningkatan Kualitas Keluarga sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan alokasi anggaran Rp. 53.229.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.247.000,- atau 90,63% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Tersedianya Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 31.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.047.000,- atau 88,53% dari Alokasi anggaran;
- 2) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Jumlah pengembangan kegiatan masyarakat untuk

peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 21.549.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.200.000,- atau 93,74% dari Alokasi anggaran.

9) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak bertujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memberikan informasi data terpilah gender dan anak secara up to date dan akurat dengan alokasi anggaran Rp. 16.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.430.000,- atau 99,58% dari alokasi anggaran. adapun rincian kegiatan dari program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak sebagai berikut :

a) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output Kegiatan Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 16.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.430.000,- atau 99,58% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Jumlah data gender dan anak yang disajikan dengan alokasi anggaran Rp. 16.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.430.000,- atau 99,58% dari alokasi anggaran.

10) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan tujuan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan dunia usaha ditingkat kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 120.640.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 107.111.200,- atau 88,79%. Adapun rincian

kegiatan dari Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kotadengan Output Persentase PHA yang terakomodir pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 93.200.200.- dan terealisasi sebesar Rp. 81.552.000,- atau 87,50% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usahadengan alokasi anggaran Rp. 93.200.200.- dan terealisasi sebesar Rp. 81.552.000,- atau 87,50 % dari alokasi anggaran.

b) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Output Persentase Penguatan Lembaga Anak dengan alokasi anggaran Rp.27.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.559.200,- atau 93,15% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Jumlah Koordinasi

dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 27.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.559.200,- atau 93,15% dari alokasi anggaran.

11) Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dengan alokasi anggaran Rp. 33.370.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.397.100,- atau 91.09% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Perlindungan Khusus Anak sebagai berikut :

a) Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran Rp. 33.370.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.397.100,- atau 91.09% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, dengan alokasi anggaran Rp.

33.370.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.397.100,- atau 91.09% dari alokasi anggaran.

12) Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya dengan alokasi anggaran Rp. 101.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.678.201,- atau 94,54% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Pengendalian Penduduk sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Persentase Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah yang Dipetakan dengan alokasi anggaran Rp. 101.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.678.201,- atau 94,54% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan output sub kegiatan Jumlah Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang Diolah dan Dilaporkan, dengan alokasi anggaran Rp. 101.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.678.201,- atau 94,54% dari alokasi anggaran.

13) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan alokasi anggaran Rp. 3.135.979.681,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.538.770.433,- atau 80,96% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan

Budaya Lokal dengan output kegiatan Persentase Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB dengan alokasi anggaran Rp. 777.115.000,- dan teralisasi Rp 564.600.500,- atau 72,65% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal sebagai berikut:

- 1) Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja dengan output sub kegiatan Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.360.000,- atau 99,66% dari alokasi anggaran;
- 2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan output kegiatan Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;
- 3) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dengan output sub kegiatan Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik yang Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk Promosi dan KIE Program KKBPK dengan alokasi anggaran Rp. 130.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 120.694.000,- atau 92,39% dari alokasi anggaran.
- 4) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan output sub kegiatan Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program

Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan lokasi anggaran sebesar Rp. 171.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.896.000,- atau 12,76% dari alokasi anggaran. Kurangnya realisasi pada sub kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur sub kegiatan dengan mengikuti hasil pemetaan menu sub kegiatan dari pusat sehingga kegiatan terlambat dilaksanakan.

- 5) Kegiatan Pengendalian Program KKBPK dengan output sub kegiatan Jumlah Balai Penyuluhan KKBPK yang tersedia Pengelolaannya dengan lokasi anggaran Rp. 445.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 392.650.500,- atau 88,14% dari alokasi anggaran.
- b) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan output Kegiatan Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan alokasi anggaran Rp. 1.520.133.681,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.497.336.516,- atau 98,50% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB dengan output sub kegiatan Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB dengan alokasi anggaran Rp 944.133.681,- dan terealisasi sebesar Rp. 921.336.516,- atau 97,59% dari alokasi anggaran;
 - 2) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan output sub kegiatan Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Digerakkan dengan alokasi anggaran Rp 576.000.000,- dan

terrealisasi sebesar Rp. 576.000.000,- atau 100% dari alokasi anggaran.

- c) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kotadengan output kegiatan Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 349.355.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 115.044.417,- atau 32,93%. Kurangnya realisasi anggaran disebabkan oleh adanya perubahan nomengklatur sub kegiatan dengan mengikuti hasil pemetaan menu sub kegiatan dari pusat sehingga kegiatan terlambat dilaksanakan. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnyadengan output sub kegiatan Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang Didistribusikan Ke Fasilitas Kesehatan (Faskes)termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan alokasi anggaran 27.405.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.476.000,- atau 78,37% dari alokasi anggaran;
- 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan output sub kegiatan Jumlah Peserta KB yang Menggunakan MKJP dengan alokasi anggaran Rp. 252.855.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.094.417,- atau 9,92% dari alokasi anggaran.

Rendahnya realisasi belanja pada sub kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) disebabkan pada belanja jasa kantor yang kurang terealisasi karena rendahnya pencapaian akseptor KB baru, dari target 3.475

orang tercapai hanya 541 orang atau 15,56% dengan rincian sebagai berikut:

- a. IUD dari target 759 orang hanya terealisasi 121 orang atau 15,94%
- b. MOP target 28 orang realisasi 0 atau 0%
- c. MOW target 737 orang terealisasi 42 orang atau 5,69%
- d. IMP target 1951 realisasi 378 orang atau 19,37%

3) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesertaan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan output sub kegiatan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesertaan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan alokasi anggaran Rp. 35.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.990.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran;

4) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dengan output sub kegiatan Jumlah Pelayanan KB Bergerak dengan alokasi anggaran Rp. 54.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.230.000,- atau 99,23% dari alokasi anggaran;

d) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan output kegiatan Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB dengan alokasi anggaran Rp. 489.376.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 361.789.000,- atau 73,93% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB sebagai berikut:

1) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan output sub kegiatan Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan

Program KKBPK di Kampung KB dengan alokasi anggaran Rp. 465.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 338.423.000,- atau 72,66% dari alokasi anggaran;

- 2) Pembinaan Terpadu Kampung KB dengan output Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB dengan alokasi anggaran Rp. 23.626.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.366.000,- dari alokasi anggaran.

10) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu/wanita di bidang ekonomi sebagai upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka membangun kemandirian dan ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, dengan alokasi anggaran Rp. 897.829.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 466.009.000,- atau 51,90% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera yaitu sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargadengan output Kegiatan Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK R,BKL,UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang Dibina dengan alokasi anggaran Rp. 897.829.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 466.009.000,- atau 51,90% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)dengan output sub kegiatanJumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKAS) yang Tersedia

- dengan alokasi anggaran Rp. 125.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 125.400.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;
- 2) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan output sub kegiatan Jumlah Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan alokasi anggaran Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.349.000,- atau 96,75% dari alokasi anggaran;
 - 3) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksanan (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan output kegiatan Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 352.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.060.000,- atau 13,90% dari alokasi anggaran.
 - 4) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) dengan output sub kegiatan Terlaksananya promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, generasi Berencana, kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) dengan alokasi anggaran Rp. 378.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 252.000.000,- atau 66,67% dari alokasi anggaran.

2.1.1. TABEL CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	100%	86,72			
					8.588.889.881	7.448.702.029			
1	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	100%	98,16			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.163.990.700	4.087.539.395 (97,63)			
				Kegiatan :					
				Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.530.800	18.310.800 (93,75)			
				Sub Kegiatan :					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.873.900	10.233.900 (94,11)			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.286.000	3.966.000 (92,53)			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.905.100	1.905.100 (100)			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.150.700	910.700 (79,14)			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.315.100	1.295.100 (98,48)			
				Kegiatan :					

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.287.205.000	3.226.513.431 (98,15)			
			Sub Kegiatan :					
			Penyediaan gaji Tunjangan ASN	3.275.675.000	3.215.273.431 (98,16)			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	7.380.000	7.100.000 (96,21)			
			Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.150.000	4.140.000 (99,76)			
			Kegiatan :					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.467.500	84.501.245 (98,97)			
			Sub Kegiatan :					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1.458.000	1.458.000 (100)			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.259.500	4.759.500 (76,04)			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	2.400.000	2.400.000 (100)			
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	277.350.000	275.883.745 (99,47)			
			Kegiatan :					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	91.666.000	91.666.000 (100)			
			Sub Kegiatan :					
			Pengadaan Mebel	15.000.000	15.000.000 (100)			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.666.000	76.666.000 (100)			
			Kegiatan :					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	365.881.400	354.579.218 (96,91)			

				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72.404.600	71.260.950 (98,42)			
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	67.500.000	57.730.268 (85,54)			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.976.800	225.588.000 (99,83)			
				Kegiatan :					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	112.240.000	111.968.701 (99,76)			
				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.180.000	98.973.701 (99,79)			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.120.000	8.055.000 (92,20)			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	4.940.000	4.940.000 (100)			
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	100%	84,19			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					27.200.000	22.899.200 (84,14)			
				Kegiatan :					
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	27.200.000	22.899.200 (84,19)			

				Sub Kegiatan :						
				Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	27.200.000	22.899.200 (84,19)				
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100%	91,45				
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran				
					38.949.500	35.620.500 (91,45)				
				Kegiatan :						
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah	38.949.500	35.620.500 (91,41)				
				Sub Kegiatan :						
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	38.949.500	35.620.500 (91,45)				
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	100%	90,64				
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran				
					53.229.900	48.247.000 (90,64)				
				Kegiatan :						
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	53.229.900	48.247.000 (90,64)				

				Sub Kegiatan :					
				Advokasi Kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	31.680.000	28.047.000 (88,53)			
				Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kab/Kota	21.549.900	20.200.000 (93,74)			
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	100%	99,58			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					16.500.000	16.430.000 (99,58)			
				Kegiatan :					
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah kab/Kota	16.500.000	16.430.000 (99,58)			
				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan data gender dan anak di kewenangan Kab/Kota	16.500.000	16.430.000 (99,58)			
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	100%	88,79			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					120.640.200	107.111.200 (89,58)			
				Kegiatan :					

				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	93.200.000	81.552.000 (87,50)			
				Sub Kegiatan :					
				Advokasi kebijakan dan pendampingan Hak Anak pada lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	93.200.000	81.552.000 (87,50)			
				Kegiatan :					
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	27.440.000	2.555.920 (93,15)			
				Sub Kegiatan :					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.440.000	2.555.920 (93,15)			
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100	91,09			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					33.370.000	30.397.100 (91,09)			
				Kegiatan :					
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	33.370.000	30.397.100 (91,09)			
				Sub Kegiatan :					

				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	33.370.000	30.397.100 (91,09)			
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	RKPD 2022	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100	74,98			
					4.135.009.581	3.100.457.634			
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	100	94,54			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					101.200.000	95.678.201 (94,54)			
				Kegiatan :					
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	101.200.000	95.678.201 (94,54)			
				Sub Kegiatan :					
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	101.200.000	95.678.201 (94,54)			
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	100%	80,96			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					3.135.979.681	2.538.770.433 (80,96)			
				Kegiatan :					

				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	777.115.000	564.600.500 (72,65)			
				Sub Kegiatan :					
				Advokasi Program KKBPK kepada stakeholder dan Mitra Kerja	4.375.000	4.360.000 (99,66)			
				Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Lokal	25.000.000	25.000.000 (100)			
				Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta media Luar Ruang	130.640.000	120.694.000 (92,39)			
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) & Mini Loka karya (Minilok)	171.600.000	21.896.000 (12,76)	Perubahan Nomenklatur Menu Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan hasil pemetaan di Pusat		
				Pengendalian Program KKBPK	445.500.000	392.650.500 (88,14)	Perubahan Nomenklatur Menu Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan hasil pemetaan di Pusat		
				Kegiatan :					

				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.520.133.681	1.497.336.516 (98,50)			
				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PKLB	944.133.681	921.336.516 (97,59)			
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedsaan (IMP)	576.000.000	576.000.000 (100)			
				Kegiatan :					
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/Kota	349.355.000	115.044.417 (243,59)			
				Sub Kegiatan :					
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6.750.000	2.730.000 (40,44)	Perubahan Nomenklatur Menu Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan hasil pemetaan di Pusat		
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	252.855.000	25.094.417 (9,92)	Perubahan Nomenklatur Menu Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan hasil pemetaan di Pusat		
				Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	0	0			

				Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan termasuk jaringan dan	35.100.000	32.990.000 (93,99)			
				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	54.650.000	54.230.000 (99,23)			
				Kegiatan :					
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	489.376.000	361.789.000 (73,93)			
				Sub Kegiatan :					
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	465.750.000	338.423.000 (72,66)	Kurangnya Penyuluh KB di Kepulauan		
				Pembinaan Terpadu Kampung KB	23.626.000	23.366.000 (98,90)			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	100%	51,90			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					897.829.900	466.009.000 (51,90)			
				Kegiatan :					

				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	897.829.900	466.009.000 (51,90)			
				Sub Kegiatan :					
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	125.400.000	125.400.000 (100)			
				Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20.000.000	19.349.000 (96,75)			
				Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	352.880.000	49.060.000 (13,90)	1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendampingan Bumil mulai dari Pemeriksaan sampai pasca persalinan 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendampingan		

							bagi Calon Penganting		
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	378.000.000	252.000.000 (66,67)	Lambatnya pengusulan Nama dan No. HP Tim Pendamping Keluarga sehingga pendistribusian Pulsa Terhambat		
				Sosialisasi IPK	21.549.900	20.200.000 (93,74)			

2.1.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DP3AP2KB

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Ket.
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
1	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	1. Persentase Partisipasi Perempuan dilembaga pemerintah	%	13,74	13,87	100,95	
	2. Partisipasi Perempuan dilembaga Swasta	%	43,72	45,45	103,96	
	3. Rasio KDRT	%	2,21	0,05	2,26	
	4. Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	42,85	42,76	99,79	
	5. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak tindakan kekerasan	100%	0,56	0,5	89,28	
2.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	1. Rata – rata jumlah anak perkeluarga	%	2	2,54	127	
	2. Rasio akseptor KB Baru	%	19,76	0,069	0,35	
	3. Cakupan Peserta KB Aktif	%	80,75	0,72	0,89	

2.1.3. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN TAHUN 2022 DP3AP2KB

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
1	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	1. Persentase ARGH pada Belanja Langsung APBD	%	25	0,543	2,172	PP
	2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	0,036	0.036	Pemberdayaa n Perempuan
	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,45	0,02	4,44	
	4. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	OPD	28	43	153,57	
	5. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	OPD	28	13	46,43	
	6. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		6	6	100	Perlindungan Anak
	7. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	10	8	80	
	8. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Org	16	16	100	
	9. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Lembaga	10	10	100	
	10. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota)	Lembaga	10	1	20	Dinsos

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
	11. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Ormas	28	34	121,43	
	12. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Org	105	62	59,05	Pemberdayaan Perempuan
	13. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Ormas	28	50	178,57	
	14. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Unit	5	2	40	P2TP2A & PUSPAGA
	15. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	-	-	-	-	Belum ada kebijakan/Perbup
	16. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	-	-	-	-	Belum ada lembaga di Kep. Selayar
	17. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	0,45	133	29,55	
2	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	1. TFR (Angka Kelahiran Total)		2,08	2,2	1,057	Bid. Dalduk
	2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	58,23	0,72	0,92	
	3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,15	0,17	2,08	

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
	4. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		1 Dok	-		Tidak Tersedia (Keterbatasan Anggaran)
	5. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	%	23	≥ 20	0,86	
	6. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	1,46	0,025	1,71	
	7. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	35.706	339	949,42	
	8. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	%	20	17	85	
	9. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Faskes	15 Faskes	15 Faskes	100%	
	10. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	16,10	19,73	122,54	
	11. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Pokja Kampung KB	88	27	30,68	
	12. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	7	7	100	
	13. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	1340	25	1,86	
	14. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	97143	9932	10,22	

**2.1.4. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN
DALAM PERJANJIAN KINERJA**

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
1.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Rp. 8.588.889.881,-	Rp. 7.448.702.029,-	Rp. 1.138.837.952,-	86,49	10			
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Rp. 4.453.880.300,-	Rp. 4.348.244.395,-	Rp. 105.635.905,-	50,63	7	98,16	15	47,59
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp. 4.135.009.581,-	Rp. 3.100.457.634,-	Rp. 1.033.202.047,-	94,54	3	74,98	6	35,86

2.1.5. INOVASI

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5

2.1.6. PRESTASI/ PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan Realisasi Tindak Lanjut APFP		19 Des 2021			Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	Gelas Pengawasan Daerah Tahun 2022
2.	Wajib Pajak Daerah Bendahara dengan Kepatuhan Pelaporan Pajak Daerah Terbaik Tahun 2021		10 Oktober 2022			Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	Gelas Pengawasan Daerah Tahun 2022

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN TAHUN 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	4	5
1.			

BAB III

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Pertanggung jawaban kinerja dalam pencapaian visi dan misi lembaga yang dibuat setiap tahun anggaran berakhir dan bertujuan untuk perbaikan manajemen pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah.

Permasalahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah terbatasnya sarana dan prasarana kantor, jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki masih kurang untuk mendukung pelaksanaan program di seluruh Desa dan Kecamatan.

Untuk mengantisipasi kendala yang ada, maka dilakukan berbagai upaya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada namun, tetap mengusahakan sarana prasarana yang layak dan memadai. Meningkatkan sumber daya aparatur dengan mengikuti berbagai pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dengan adanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat menjadikan sebagai acuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Kami menyadari penyusunan LKPJ ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan kami perlukan untuk perbaikan penyusunan LKPJ ini.

Benteng, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MASSAILE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650806 199402 1 003

